

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Organisasi

1.1. Latar Belakang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mempunyai kewajiban dan keharusan mendukung Kepala Daerah untuk melaporkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dalam bidang pengawasan, melalui visi dan misi serta rencana strateginya yang mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam tugasnya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan fungsi Perencanaan Program Pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 dan penyempurnaan Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, maka Inspektorat melakukan penyempurnaan. Sasaran Kinerja yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan indikator kinerja:
 - a. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk;
 - b. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk);
 - c. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai;
 - d. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B.
 - e. Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat, dengan indikator kinerja :
 - a. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi

1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

1.2.1 Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk beserta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

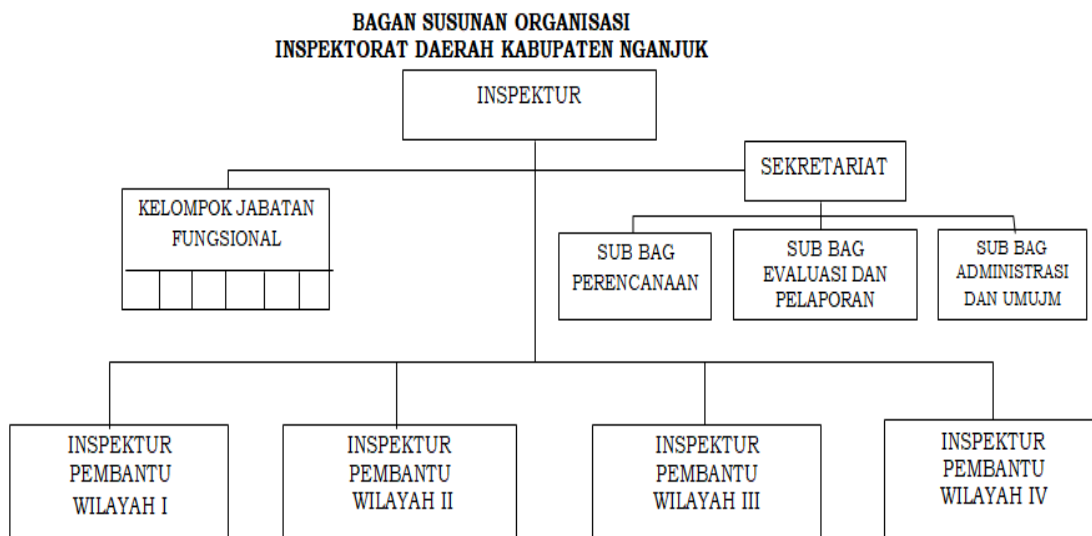
1. Inspektur Daerah Kabupaten ;
2. Sekretariat dengan 3 Sub Bagian yaitu : 1 Sub Bagian Perencanaan, 1 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 1 Sub Bagian Adiministrasi dan Umum ;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Kualifikasi dan jumlah pegawai yang menangani urusan tersebut disusun dalam tabel sebagaimana berikut :

No	NIP	NAMA	GOL/PANGKAT	PENDIDIKAN	JABATAN
1	19601119 198509 1 004	Drs LISHANDOYO, M.Si	IV/c (Pembina Utama Muda)	S2	Inspektur Daerah
2	19620819 199403 1 006	Ir. RENDRA FACHMI, M.Si	IV/b (Pembina TK I)	S2	Sekretaris
3	19640404 199003 1 018	Drs. SUYANTO	IV/b (Pembina TK I)	S1	Irbanwil I
4	19610720 198202 1 002	Ir. KUSNO HARIYANTO, MM	IV/b (Pembina TK I)	S2	Irbanwil II
5	19610703 199203 2 002	Dra. SURATMI, MM	IV/b (Pembina TK I)	S1	Irbanwil III
6	19631130 199302 1 002	Drs. GUNTORO MOH AS'AN, MM	IV/b (Pembina TK I)	S2	Irbanwil IV
7	19610521 198403 1 005	HERU SUSETYO, S.Sos, MM	IV/a (Pembina)	S2	Kasubag Adm & Umum
8	19660620 199602 1 002	SUTANTO ADI S, SE	III/d (Penata TK I)	S1	Kasubag evalap
9	19731207 199503 2 002	ARIK DYAH RUMSARI, SE	III/d (Penata TK I)	S1	Kasubag Perencanaan
10	19611020 199303 1 005	Drs. JOKO SLAMET	III/d (Penata TK I)	S1	P2UPD Muda
11	19590924 198903 1 009	Drs. NURCAHYO	III/d (Penata TK I)	S1	P2UPD Madya
12	19710222 200604 1 008	SUMARYANA, SE	III/b (Penata Muda TK I)	S1	P2UPD Pertama
13	19821021 201001 1 015	PIYA FHATORONI, S.Kom	III/b (Penata Muda TK I)	S1	Pranata Komputer Pertama
14	19720302 20060 4 2 016	DWI TRISTANTI, SE	III/a (Penata Muda)	D3	Auditor Pelaksana Lanjutan
15	19790307 200604 1 014	LUTFI ASHARI, SE	III/c (Penata)	S1	Auditor Muda
16	19720312 200604 2 027	RENY PRIHASTUTI, SE	III/c (Penata)	S1	Auditor Muda
17	19710507 200601 1 016	DEDDY WAHYU M, SE, M.Si	III/c (Penata)	S2	Fungsional Umum
18	19850110 200312 2 002	RIZKY RUSMAWATI, S.STP, M.Si	III/c (Penata)	S2	Fungsional Umum
19	19791017 200901 1 006	WAHYU DWIPRASETYA, SE	III/b (Penata Muda TK I)	S1	Auditor Muda
20	19690620 200901 1 003	BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si	III/b (Penata Muda TK I)	S2	Auditor Muda
21	19800327 200903 2 004	INTAN ESY NURWAYA, ST	III/b (Penata Muda TK I)	S1	Auditor Muda
22	19870910 201001 2 018	NURIMA JIWAYANTI, SH	III/b (Penata Muda TK I)	S1	Auditor Pertama
23	19770908 201101 2 003	MUNDARWATI, SE	III/b (Penata Muda TK I)	S1	Fungsional Umum
24	19781123 201001 2 002	NOVARINA DIAN WARDANI, SP	III/b (Penata Muda TKI)	S1	Fungsional Umum
25	19840301 200604 1 008	ARI WIDODO, SE	III/a (Penata Muda)	S1	Auditor Pertama
26	19820420 200903 1 006	ANAS NASRULLAH, A.Md	II/d (Pengatur TK I)	D3	Auditor Pelaksana Lanjutan
27	19870803 201001 1 008	DIDIK HENDRA K, A.Md	II/d (Pengatur TK I)	D3	Auditor Pelaksana
28	19820404 200312 2 009	EMI SRIWAHYUNI	II/d (Pengatur TK I)	SLTA	Fungsional Umum
29	19800408 201101 1 008	ABDUL HADI, A.Md	II/d (Pengatur TKI)	D3	Fungsional Umum
30	19711225 200701 1 019	JONO	II/a (Pengatur Muda I)	SLTA	Fungsional Umum

Sumber : Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

Struktur Organisasi dapat disajikan sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Secara makro Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari visi, misi tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

“Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk”

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk mewujudkan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut, maka ditetapkan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu : **“Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna”**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel.

2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat.

2.2 Perencanaan Tahun 2018

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 setelah adanya penyempurnaan Renstra pada Inpektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Satuan	Target
Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.	%	85
	2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).	%	95
	3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai.	%	95
	4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B	%	35
	5. Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai	%	0,03
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat	6. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi	%	90

Adapun program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel

Indikator : - Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksa-an BPK RI atas LKPD Kabupaten Nganjuk

- Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk)
- Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai
- Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B
- Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai.

Dengan Program dan Kegiatan :

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran 2018
A.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	982.258.000
a.	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	528.241.000
b.	Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	80.064.000
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH	50.000.000
c.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	94.665.000
d.	Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	100.000.000
e.	Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15.145.000
f.	Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	24.978.000
g.	Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15.145.000
h.	Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	24.145.000
i.	Kegiatan Review RKA SKPD	40.205.000
j.	Penyusunan PKPT 2019	9.670.000
B.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	136.450.000
a.	Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan	65.000.000
b.	Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pengawasan	21.450.000
c.	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Satgas SPIP	50.000.000

b. Sasaran : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat

Indikator : - Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi

Dengan Program dan Kegiatan :

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran 2018
A.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	230.000.000
a.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	230.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program pembangunan Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Tahun 2014 – 2018 yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2018

CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna

TABEL 3.1.
TABEL PENCAPAIAN KINERJA 2018
SESUAI PENYEMPURNAAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Sasaran Strategis		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Uraian	Indikator Kinerja				
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.	%	85	92,87	109,25
	2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).	%	95	93,81	98,74

	3.	Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai.	%	95	84,26	88,69
	4.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B	%	35	44	125,71
	5.	Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai	%	0,03	0,14	21,42
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat	6.	Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi	%	90	86,67	96,30
	Rata – rata Capaian Kinerja					90,01

1. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel

Dengan indikator sebagai berikut :

Indikator 1 Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.

Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk dipengaruhi oleh Jumlah Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Rekomendasi yang seharusnya disetor ke Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD).

Selama Tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan untuk Jumlah Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) sebesar Rp.19.184.791.954,74 dari Jumlah Seluruh Rekomendasi yang seharusnya disetor ke Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD) sebesar Rp.20.657.400.467,39, dari target 85% dapat direalisasikan sebesar 92,87%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 109,25%.

Indikator 2 Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).

Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) dipengaruhi oleh Jumlah Tindak Lanjut Status Selesai dalam 1 tahun dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Rekomendasi 1 tahun.

Selama Tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan untuk Jumlah Tindak Lanjut Status Selesai dalam 1 tahun sebanyak 3.283 rekomendasi dan Jumlah Seluruh Rekomendasi 1 tahun sebanyak 3.080 rekomendasi, dari target 95% dapat direalisasikan sebesar 93,81%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 98,74%.

Indikator 3 Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai.

Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai dipengaruhi oleh Jumlah setoran ke Kas Daerah dibandingkan dengan Jumlah temuan yang harus disetor.

Selama Tahun 2018 terdapat temuan kerugian daerah sebesar Rp.2.092.819.558,00 dan telah disetor sebesar Rp.1.763.541.967,00 dari target 95% dapat terealisasi 84,26%, maka prosentase pencapaian kinerja sebesar 88,69%.

Indikator 4 . Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B.

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B dipengaruhi oleh Jumlah SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai B dibandingkan dengan Jumlah SKPD yang Dievaluasi.

Selama Tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai B sebanyak 22 SKPD dari 50 SKPD yang dievaluasi, dari target 35%

dapat direalisasikan sebesar 44%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 125,71%

Indikator 5 . Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai

Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai dipengaruhi oleh jumlah penanganan kasus yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Selama tahun 2018 telah terjadi pelanggaran disiplin oleh 13 (Tiga Belas) Aparatur Sipil Negara dari 9.149 Aparatur Sipil Negara se-kabupaten nganjuk atau sebesar 0,14% dan telah selesai ditangani dari target sebesar 0,03% pada tahun 2018 sehingga prosentase ASN yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat terkait integritas pegawai sebesar 21,42%.

Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat

Dengan indikator :

Indikator 1 Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi

Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi dipengaruhi oleh Jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal yang bersertifikat dibandingkan dengan Jumlah Apratur pengawas internal yang ada.

Selama Tahun anggaran 2018 untuk Jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal yang bersertifikat sebanyak 26 Orang dari Jumlah Apratur pengawas internal yang ada sebanyak 30 Orang, dari target 90% dapat direalisasikan sebesar 86,67%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 96,30%

TABEL 3.1.1.

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
ANTARA TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018
SESUAI DENGAN PENYEMPURNAAN UKURAN DAN TARGET KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 – 2018**

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk)	105 %	98,74 %

Tahun 2017 dengan jumlah rekomendasi atas temuan hasil pengawasan sebanyak 2.226 dan telah diselesaikan sebanyak 2.226 rekomendasi dari target kinerja 90%, sehingga capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 105%. Sedangkan Capaian Kinerja di Tahun Anggaran 2018 sebesar 98,4%, yang merupakan perbandingan kinerja dan target kinerja Tahun 2018. Selama Tahun 2018 terdapat 3.283 rekomendasi atas temuan hasil pengawasan dan telah ditindak lanjuti sejumlah 3.080 rekomendasi atau sebesar 98,74% dari target kinerja 95% pada Tahun 2018. Sehingga penurunan capaian kinerja dibanding tahun 2017 bukan karena realisasi kinerja yang turun tetapi disebabkan karena kenaikan target kinerja, termasuk sebagian rekomendasi diselesaikan pada tahun berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2018

TABEL 3.2.

**TABEL REALISASI KINERJA 2018
SESUAI PENYEMPURNAAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

Sasaran Strategis		Realisasi 2018
Uraian	Indikator Kinerja	
1	2	3
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.	92,87
	2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).	93,81
	3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai.	84,26
	4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B	44
	5. Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai	0,14
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat	6. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi	86,67

TABEL 3.2.1.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
ANTARA TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018
SESUAI DENGAN PENYEMPURNAAN UKURAN DAN TARGET KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 – 2018

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2018
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk)	100 %	93,81%

Pada Tahun 2017 terdapat 2.226 rekomendasi atas temuan hasil pengawasan dan telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 2.226 rekomendasi atau sebesar 100%.

Sedangkan untuk Tahun 2018 terdapat 3.283 Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang dapat ditindak lanjuti dari 3.080 rekomendasi yang ada, atau sebesar 93,81% dari target 95%, sehingga untuk Tahun 2018 terdapat kemunduran sebesar 6,19% untuk penyelesaian tindak lanjutnya dibandingkan Tahun 2017 bukan karena realisasi kinerja yang turun tetapi disebabkan karena kenaikan target kinerja, termasuk sebagian rekomendasi diselesaikan pada tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra (2018)

TABEL 3.3.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
ANTARA TAHUN ANGGARAN 2018
SESUAI DENGAN PENYEMPURNAAN UKURAN DAN TARGET
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 – 2018

Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk)	95 %	93,81%	(1,19%)

Permasalahan / Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance).
- f. Adanya permasalahan internal, antara lain Anggaran APIP kurang memadai, Kapabilitas APIP masih level 2, Kompetensi APIP belum merata dan tingkat maturitas SPIP masih level 2.

Peluang

- a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
 - b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
 - c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
4. Alokasi Per Sasaran Pembangunan TA. 2018

Secara Umum Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu ujung tombak pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Nganjuk baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka perwujudan *good governance*.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah pencapaian penetapan target kinerja secara optimal. Pada pengukuran kinerja kali ini secara umum kami menfokuskan pada pengukuran indikator output dan indikator outcome.

Alokasi Anggaran per sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran 2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	429.392.000
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	263.575.000
3	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.000.000
4	Program Peningkatan Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	982.258.000
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	230.000.000
6	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan System Dan Prosedur Pengawasan	136.450.000
Total		2.056.675.000

Dari anggaran diatas, maka Alokasi per sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2018 dapat dibedakan sebagai berikut :

- Sesuai Dengan Penyempurnaan Ukuran Dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018

TABEL 3.4.

**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TA. 2018
SESUAI DENGAN PENYEMPURNAAN UKURAN DAN TARGET
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 – 2018**

Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk)	94.665.000	4,6%

Dalam Penyempurnaan Ukuran Dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 indikator kinerja yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk bidang pengawasan adalah Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk), dan anggaran untuk mendukung sebesar Rp.94.665.000,00 atau 4,6% dari total anggaran Program dan

Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.2.056.675.000,00.

- Sesuai dengan Penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2014-2018

TABEL 3.4.1.
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TA. 2018
SESUAI PENYEMPURNAAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Sasaran Strategis		Anggaran	Anggaran
Uraian	Indikator Kinerja	(Rp.)	(%)
1	2	3	4
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk 2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk). 3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai. 4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B 5. Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai 	1.118.708.000	54,4
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 6. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi 	230.000.000	11,2

Dalam Penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel sebesar Rp. 1.118.708.000,00 atau 54,4% dari total anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat

Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.2.056.675.000,00, dan Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat sebesar Rp.230.000.000,00 atau 11,2% dari total anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.2.056.675.000,00.

5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.5.

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
SESUAI PENYEMPURNAAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk;	1.118.708.000	798.210.340	71,35
2.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	b. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk);			
		c. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai;			
		d. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B;			
		e. Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai			
3.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	a. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi	230.000.000	226.749.150	98,59

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk;	88,76	71,35	17,41
2.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	b. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk); c. Prosentase Penurunan temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk); d. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B; e. Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai			
3.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	a. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi	96,30	98,59	(2,29)

Dalam efisiensi penggunaan sumber daya dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Adanya efisiensi penggunaan honorarium pemeriksaan dengan memanfaatkan hari pemeriksaan yang ada, sehingga program pengawasan dapat dilaksanakan seluruhnya, dan terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran ;
- b) Adanya efisiensi penggunaan honorarium pemeriksaan karena personil yang menangani kasus pengaduan sama dengan personil

yang sedang melaksanakan pemeriksaan reguler, sehingga honorarium yang diterima hanya salah satu dari penanganan kasus atau pemeriksaan reguler ;

- c) Adanya efisiensi perjalanan dinas untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut, karena dalam penghematan penggunaan anggaran pelaksanaan penyelesaian tindak tindak lanjut dengan mewajibkan SKPD untuk selalu mengupdate data ke Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk secara langsung, yaitu dengan menemui Tim Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- d) Untuk prosentase APIP yang bersertifikasi kalau dihitung sampai dengan akhir tahun 2018 capaian kinerjanya lebih rendah dari realisasi anggaran, hal ini disebabkan karena jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang sudah bersertifikat 26 orang tersebut terdapat beberapa orang yang mengikuti pendidikan atau bersertifikat lebih dari satu jenis sertifikat diklat.

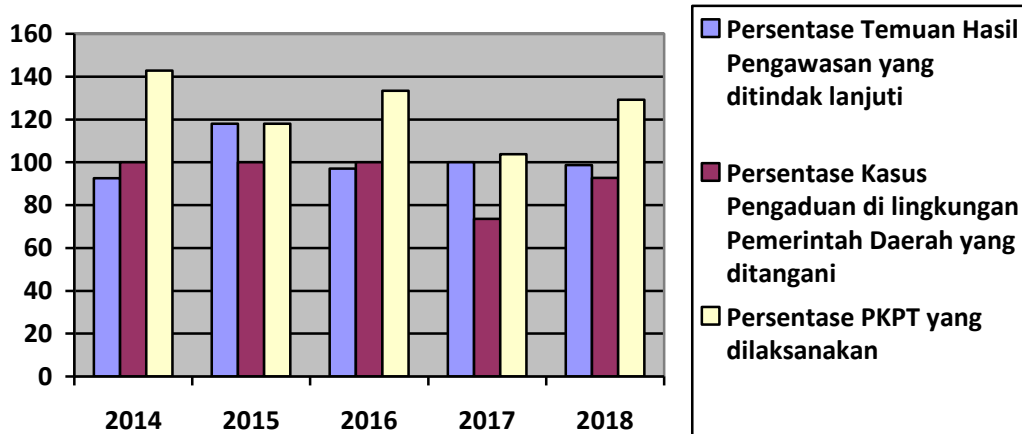
7. Pencapaian Indikator

Tabel 3.7

**Pencapaian Indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nganjuk
“Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**

Uraian	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti	92,59%	92,48%	97,07%	100%	98,74%
Persentase Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditangani	100%	100%	100%	73,5%	92,68%
Persentase PKPT yang dilaksanakan	142.86%	117,94%	133.33%	103,85%	129,13%

Dalam grafik Pencapaian Indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nganjuk “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” adalah sebagai berikut :



Pencapaian Indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nganjuk “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” secara umum mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 **TERCAPAI**, dan pada Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018.

Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.20.1.20.07.01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	429.392.000	399.538.068	93,05
1.20.1.20.07.02.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	263.575.000	242.948.037	92,17
1.20.1.20.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	13.424.650	89,50
1.20.1.20.07.06.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	-	-	-
1.20.1.20.07.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	982.258.000	688.651.890	70,11
1.20.1.20.07.21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	230.000.000	226.749.150	98,59
1.20.1.20.07.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	136.450.000	109.558,450	80,29
JUMLAH		2.056.675.000	1.680.870.245	

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 untuk mencapai sasaran untuk “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” yaitu :

Uraian		Anggaran	Realisasi	%
Program	Kegiatan			
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	528.241.000	316.552.500	59,93
	b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	80.064.000	65.450.950	81,75
	c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	94.665.000	74.313.050	79,56
JUMLAH		702.970.000	456.316.500	

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah serta Pemerintahan Desa untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan target dan atau melebihi target yang telah dicanangkan.

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di masa yang akan datang, antara lain :

- A. Faktor-faktor yang menghambat capaian kinerja adalah :
 - a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
 - b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
 - c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
 - d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
 - e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance).

- f. Adanya permasalahan internal, antara lain Anggaran APIP kurang memadai, Kapabilitas APIP masih level 2, Kompetensi APIP belum merata dan tingkat maturitas SPIP masih level 2.
- B. Upaya dan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sehingga dapat dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan adalah :
- a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
 - b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
 - c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

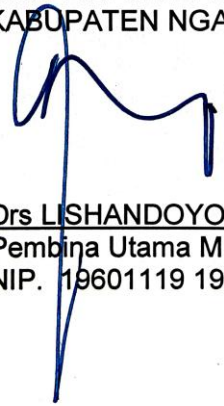
1.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya kita dapat mengetahui capaian kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2018.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan.

Nganjuk, 09 JAN 2019

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK


Drs LISHANDOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601119 198509 1 004